

Judul : Softbank batal danai IKN, tenang akan ada investor baru
Tanggal : Rabu, 16 Maret 2022
Surat Kabar : Rakyat Merdeka
Halaman : 7

SoftBank Batal Danai IKN

Tenang, Akan Ada Investor Baru

Senayan menyoroti mundurnya SoftBank Group Corp dari proyek pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) Indonesia. Tanpa investasi dari perusahaan modal ventura asal Jepang itu, dikhawatirkan penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) makin besar untuk IKN.

ANGGOTA Komisi V DPR Suryadi Jaya Purnama meminta Pemerintah mengkaji serius dampak penarikan investasi tersebut. Khususnya persentase sumber-sumber pendanaan IKN. Pahalanya, mencari investor baru bukan hal mudah.

"Pemerintah jangan sampai memperbesar pemakaian dana APBN demi keinginan mengejar target pembangunan IKN tepat waktu," tegas Suryadi dalam keterangannya, kemarin.

Suryadi lalu mempertanyakan alasan mundurnya perusahaan tersebut tatkala Pemerintah telah melantik Kepala dan Wakil Kepala Otorita IKN, yaitu Bambang Susantono dan Dhony Rahajoe.

Padahal, UU Nomor 3 Tahun 2022 tentang IKN memberikan kewenangan khusus kepada Otorita IKN berupa pemberian perizinan investasi, kemudahan berusaha, serta pemberian fasilitas khusus kepada pihak yang mendukung pembiayaan IKN.

"Fraksi PKS mengusulkan agar DPR memanggil Kepala Otorita IKN untuk memberikan penjelasan tentang rencana Otorita mencari investor-investor baru untuk IKN," jelas

mantan anggota Panitia Khusus (Pansus) RUU IKN DPR ini.

Suryadi menjelaskan, dalam Rencana Induk IKN disebutkan bahwa relokasi penduduk ke IKN akan dimulai pada 2023. Ini diawali personel TNI, Polri, dan BIN dan awal tahun 2024 representasi badan eksekutif, legislatif, yudikatif, serta ASN.

Dengan tenggat waktu hanya 1-2 tahun ke depan, dia menilai, mundurnya Softbank dinilai akan menjadi preseden buruk bagi calon-calon investor IKN.

Terlebih, belum ada kejelasan skema peluang investasi asing terutama dengan skema *Public Private Partnership*. Belum lagi, risiko politik dan kegaduhan belakangan tentang perpanjangan masa jabatan presiden dan pengunduran jadwal Pemilu 2024.

"Ini yang akan membuat investor memilih *wait and see*," kata dia.

Sementara, Ketua Komisi V DPR Lasarus berharap pembangunan IKN Nusantara melibatkan masyarakat sekitar.

"Penting harga hak-hak serta kearifan masyarakat lokal. Dan yang lebih penting lagi, masyarakat lokal dapat diberi-

kan kesempatan untuk berpartisipasi di berbagai bidang kegiatan," ujar Lasarus dalam keterangannya, kemarin.

Politikus PDIP ini menekankan, pembangunan IKN di Kalimantan Timur (Kaltim) bukan dimaknai pemindahan masalah dari Jakarta. Pemindahan IKN harus membawa kemaslahatan bagi masyarakat di sana.

"Jangan jadikan masyarakat Kalimantan sebagai penonton saja dari gendang dan tarian pemindahan ibu kota negara ini," wanti-wanti dia.

Terpisah, Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan, Pemerintah sudah mengetahui SoftBank bakal mundur dari investor proyek IKN. Mereka mundur karena permasalahan internal yang membuat tidak memiliki dana untuk investasi di IKN.

"SoftBank dari awal sudah mundur, sejak sahamnya drop. Jadi dia tidak ada (dana), ya sudah *off*," ujar Luhut di Jakarta, kemarin.

Namun, Luhut memastikan akan ada investasi dari Abu Dhabi dan Arab Saudi untuk membangun IKN. Dua negara tersebut sudah berkomitmen investasi sebesar 20 miliar dolar AS. Dana tersebut akan digunakan untuk membangun gedung-gedung selain Pemerintah.

"Sisanya, tidak masalah yang gedung-gedung pemerintahan dibayar APBN," pungkasnya. ■ TIF